

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATIK GIRILAYU
TERHADAP PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

M. ZAKI ATTIRMIDZI
C 100 150 220

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATIK GIRILAYU TERHADAP
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)**


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

M. ZAKI ATTIRMIDZI
C100150220

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATIK GIRILAYU TERHADAP
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)**

Oleh:

M. ZAKI ATTIRMIDZI
C100150220

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 4 Februari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Januari 2019

Penulis



M. Zaki Attirmidzi
C100150220

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATIK GIRILAYU TERHADAP
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)**

Abstrak

Batik merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah batik Girilayu. Permasalahan yang terdapat pada batik Girilayu dalam hal ini adalah mengenai cara memperoleh perlindungan hukum pada batik yang diatur dalam aturan hak kekayaan intelektual dan mengenai kesadaran hukum pengrajin batik terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dan dokumen hukum, dan juga menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk memperoleh perlindungan batik kontemporer dan batik tradisional telah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta namun perlindungan hukum batik tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017 tentang kekayaan intelektual komunal. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Melihat kesadaran hukum pada para pengrajin batik Girilayu dengan dibandingkan dengan teori kesadaran hukum, maka para pengrajin batik Girilayu belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: kesadaran hukum, perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual

Abstract

Batik is one of Indonesia's cultural heritages, one of which is Girilayu batik. The problem in this study is about how to obtain legal protection for batik regulated in the rules of intellectual property rights and regarding legal awareness of batik artisans on the importance of protecting intellectual property rights. This study using the juridical empirical approach method whose main data source is primary data in the form of interviews and legal documents, and also uses secondary data sources which are then analyzed qualitatively aimed at producing descriptive data. From this study, the results obtained to obtain protection of contemporary batik and traditional batik have been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning copyright, but legal protection of traditional batik is further regulated in Ministerial Regulation number 13 of 2017 concerning communal intellectual property. Legal protection for brands has been regulated in Law number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. Seeing the legal awareness of the Girilayu batik craftsmen compared to the theory of legal awareness, the Girilayu batik craftsmen do not yet know and understand the importance of protecting intellectual property rights.

Keywords: legal awareness, legal protection, intellectual property rights

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹ Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.² Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.³

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia.⁴ Salah satu warisan budaya tradisional adalah batik Girilayu yang terletak di Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Batik Girilayu salah satu sentra industri pengrajin batik yang ada turun temurun, dimana sentra pembatikan di Desa Girilayu sudah ada sejak zaman Mangkunegaran I. Karena itulah, hingga saat ini motif batik Girilayu dipengaruhi gaya membatik khas Mangkunegaran, baik teknik pembuatan, bahan, pewarnaan, sampai motif yang digunakan.⁵

¹Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, hal. 14.

²Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hal. 12.

³Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, hal. 22.

⁴Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik TanjungBumi Madura”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Februari,2011) hal. 1.

⁵Bramantyo, Okezone News, 2017, *Kampung Batik Girilayu Saksi Panjang Perjalanan Batik Pasca Terbelahnya Kerajaan Mataram*, Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2017/10/03/512/1787523/kampung-batik-girilayu-saksi-panjang-perjalanan-batik-pasca-terbelahnya-kerajaan-mataram?page=1> , pada Tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 12.48 WIB

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.⁶ Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia.⁷ Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual⁸, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aturan lainnya. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk diperbarui dan meramunya menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan secara individual.⁹

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga saat ini masih lemah, dibuktikan dengan para pengrajin batik Girilayu yang sampai saat ini belum mengerti dan memahami dengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan hak merek. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para usaha kecil menengah, namun niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri dalam sosialisasi tersebut masih belum ada. Karena jika warga Desa Girilayu khususnya para pengrajin batik mengetahui

⁶Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 37.

⁷Cita Yustisia Serfiyanti & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 6.

⁸Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, hal. 50.

⁹Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, hal. 33.

pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual maka para pengrajin batik akan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat Jendral HKI. Manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain memberikan kepastian hukum kepada pencipta, inovator atas hasil karyanya lalu dapat meningkatkan omzet penjualan apabila batik tersebut dijual di berbagai daerah karena sudah memiliki ciri khas tersendiri pada batik Girilayu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana memperoleh perlindungan hukum terhadap batik pada hak cipta dan hak merek yang diatur dalam aturan hak kekayaan intelektual. *Kedua*, bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum terhadap batik pada hak cipta dan hak merek yang diatur dalam aturan hak kekayaan intelektual. *Kedua*, untuk mengetahui kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah harapan untuk para pengrajin batik Girilayu mendapatkan pemahaman serta kesadaran mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi buka mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tempat penelitian dilakukan di Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

¹⁰Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Batik pada Hak Cipta dan Hak Merek yang Diatur dalam Aturan Hak Kekayaan Intelektual

Bahwa perlindungan hukum terhadap batik yang diatur di dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), telah diatur di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017 tentang kekayaan intelektual komunal. Dalam aturan hak cipta, hasil ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sudah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis tanpa dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral HKI. Perlindungan hukum terhadap batik kontemporer telah diatur di dalam Pasal 40 huruf j UU nomor 28 tahun 2014, sedangkan perlindungan hukum terhadap batik tradisional telah diatur di dalam Pasal 38 UU nomor 28 tahun 2014. Namun demikian, di dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap batik lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah belum mengatur, sehingga Negara mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017 sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus menjaga dan melindungi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik, untuk itu batik sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak ada Negara lain yang dengan seenaknya mengambil kekayaan intelektual milik bangsa Indonesia. Dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan Inventarisasi batik sebagai ekspresi budaya tradisional diwajibkan untuk mengisi formulir inventarisasi ekspresi budaya tradisional, dimana formulir tersebut sistematikanya sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri.

Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, untuk mendapatkan perlindungan hukum berbeda dengan hak cipta, dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek harus didaftarkan terlebih dahulu, hal ini telah diatur di dalam Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2016 yang menjelaskan hak atas merek didapatkan setelah merek terdaftar, karena prinsip yang ada pada merek itu sendiri menganut prinsip *first to file* dimana yang mendaftarkan mereknya pertama kali

dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan. Dalam pemberian merek pada barang yang dalam hal ini adalah batik, pada hakikatnya memiliki dua jenis merek yang berbeda tidak dilarang, untuk jenis merek yang pertama merupakan merek kolektif dan jenis merek yang kedua adalah jenis merek individu yang dimiliki oleh perorangan. Namun demikian, dalam mendaftarkan merek kolektif harus memiliki sifat, ciri umum dan kualitas barang yang sama atau bagus, sehingga dalam membuat batik dengan jenis merek kolektif harus membuat kualitas yang bagus, berbeda dengan merek individu yang memiliki kebebasan dalam membuat batik dan tidak ada batasan minimal harus membuat batik seperti merek batik jenis merek kolektif.

3.2 Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu terhadap Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Bahwa dengan melihat kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, para pengrajin batik belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya untuk batik.¹¹ Padahal peran Pemerintah Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual namun para pencipta, inovator dan pendesain tidak menganggap sosialisasi tersebut penting untuk mereka. Bahkan Pemerintah Daerah Karanganyar sudah memberikan perhatian dengan menetapkan Desa Girilayu sebagai sentra kerajinan batik tulis di Karanganyar sehingga dengan begitu banyak konsumen dari dalam maupun luar Karanganyar berkunjung ke Desa Girilayu untuk membeli batik khas Girilayu.¹²

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, dimana kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor suatu ketentuan hukum tertentu untuk diketahui, dipahami, dan ditaati. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat adalah penggunaannya

¹¹Sugiyem & Marinah & Karni, Pengrajin Batik Girilayu, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2018, pukul 13.32 WIB

¹²Widodo, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Disperindag Kabupaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2018, pukul 10.14 WIB

secara sadar oleh masyarakatnya untuk menciptakan suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Apabila melihat pada kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, taraf kesadarannya masih sangat rendah. Dilihat dengan hasil wawancara kepada para pengrajin batik Girilayu bahwa mereka sama sekali belum mengetahui dan memahami aturan tentang hak kekayaan intelektual.

Hal ini dengan dilihat dalam teori kesadaran hukum yang memiliki empat indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hak kekayaan intelektual, kemudian pengetahuan tentang isi peraturan hak kekayaan intelektual, sikap para pengrajin batik Girilayu terhadap peraturan hak kekayaan intelektual, dan pola-pola perikelakuan hukum.¹³ Sehingga dengan dikomparasikan antara keempat indikator teori kesadaran hukum dengan perilaku pengrajin batik Girilayu, maka dapat dinyatakan bahwa para pengrajin batik Girilayu belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan kata lain kesadaran hukum berarti persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan, norma, atau asas.

Namun permasalahan yang ada di Desa Girilayu tidak hanya masalah kurangnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi permasalahan yang lainnya adalah kurangnya modal bagi para pengrajin dalam membuat batik, disamping Pemerintah Daerah memberikan perhatian kepada batik Girilayu sebagai sentra batik di Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah seharusnya juga memberikan dukungan modal kepada para pengrajin batik Girilayu khususnya untuk para pengrajin batik Girilayu yang masih merintis. Pemerintah Daerah harus melakukan tinjau lokasi agar sasaran yang mendapatkan dukungan modal benar-benar usaha yang masih merintis.

¹³Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 145.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Batik pada Hak Cipta dan Hak Merek yang diatur dalam Aturan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diperoleh pada saat hasil ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan terhadap batik telah diatur di dalam Pasal 40 huruf j Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dimana batik yang dilindungi merupakan batik kontemporer. Sedangkan perlindungan hukum batik tradisional telah diatur dalam Pasal 38 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan batik tradisional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini Negara belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Negara kemudian mengisi kekosongan hukum tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2017 tentang kekayaan intelektual komunal sebagai produk hukum untuk melindungi ekspresi budaya tradisional salah satunya adalah batik.

Untuk perlindungan hukum terhadap hak merek harus didaftarkan terlebih dahulu merek tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2016, karena hak merek menganut prinsip *first to file*. Dalam mendaftarkan merek harus memenuhi beberapa syarat yang sudah tercantum di dalam Undang-undang merek. Pada hakikatnya memiliki dua jenis merek batik yang berbeda tidak dilarang. Untuk merek yang pertama merupakan merek kolektif yang harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang merek yang mengatur merek kolektif dan jenis merek yang kedua merupakan merek perorangan.

4.1.2 Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu terhadap Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Bahwa dengan melihat kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, para pengrajin batik belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya untuk batik. Hal ini dengan dilihat dalam teori kesadaran hukum yang memiliki empat indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hak kekayaan intelektual, kemudian pengetahuan tentang isi peraturan hak

kekayaan intelektual, sikap para pengrajin batik Girilayu terhadap peraturan hak kekayaan intelektual, dan pola-pola perikelakuan hukum. Sehingga dengan dikomparasikan antara keempat indikator teori kesadaran hukum dengan perilaku pengrajin batik Girilayu, maka dapat dinyatakan bahwa para pengrajin batik Girilayu belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan kata lain kesadaran hukum berarti persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan, norma, atau asas.

4.2 Saran

Pertama, Sebaiknya para pengrajin batik Girilayu menumbuhkan kesadaran hukumnya terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, agar para pengrajin batik mengetahui dan memahami betul substansi dari aturan mengenai hak kekayaan intelektual tersebut yang memiliki banyak manfaat yang dapat diterima oleh para pengrajin batik.

Kedua, Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan modal kepada para pengrajin batik Girilayu, karena selain permasalahan mengenai kurangnya kesadaran hukum, para pengrajin batik Girilayu juga mengalami permasalahan terhadap modal dalam membuat batik yang khususnya bagi para usaha batik yang masih merintis. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus melakukan tinjau lokasi agar sasaran yang mendapatkan dukungan modal benar-benar usaha yang masih merintis.

Ketiga, Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sudah cukup baik dengan munculnya aturan-aturan baru mengenai kekayaan intelektual. Namun demikian, masih ada saja Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum mengatur, hal ini salah satunya dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana inventarisasi ekspresi budaya tradisioanal diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Meskipun Negara sudah membuat Peraturan Menteri terkait inventarisai ekspresi budaya tradisional tetapi juga harus dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah.

Persantunan

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, bapak dan ibu saya tercinta yang selalu mendoakan serta memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, keluarga cemara saya yang selalu memberikan dukungan. *Ketiga*, pembimbing skripsi saya yang saya hormati yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis karya ilmiah ini dengan kesabaran dan ketulusan hati. *Keempat*, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada saya selama perkuliahan. *Kelima*, sahabat-sahabat dan peran seorang wanita yang selalu menyemangati saya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurachmad, Much., 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru.
- Purba, Afrillyanna & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Purwangsih, Endang, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju.
- Serfiyani, Cita Yustisia & Iswi Hariyani & Serfianto D. P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subroto, Muhammad achmad & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks.

Karya Ilmiah:

Rahayu, Devi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik TanjungBumi Madura*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1.

Artikel:

Bramantyo, 2017, *Kampung Batik Girilayu Saksi Panjang Perjalanan Batik Pasca Terbelahnya Kerajaan Mataram*, <https://news.okezone.com/read/2017/10/03/512/1787523/kampung-batik-girilayu-saksi-panjang-perjalanan-batik-pasca-terbelahnya-kerajaan-mataram?page=1>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.48 WIB.